



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



Nomor : KP.02.05/2/1360/2021

15 Maret 2021

Hal : Pemutakhiran data PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Yth. (Daftar sesuai Lampiran 1)

Menindaklanjuti surat Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor 685/B-SI.01.01/SD/E.III/2021 tanggal 9 Maret 2021 perihal Persiapan Implementasi *Single Sign On* (SSO), *Digital Signature* (DS) Nasional, dan Pemutakhiran Data Mandiri ASN serta dalam rangka mendukung program percepatan data ASN dengan salah satunya melalui proses pemutakhiran data mandiri ASN, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan *otentikasi* satu pintu melalui *Single Sign On* (SSO) dan *Digital Signature* (DS) memerlukan proses aktivasi dengan menggunakan *e-mail* dan nomor telepon ASN sebagai kunci akses.
2. Proses aktivasi akun MySAPK akan dilakukan dengan menggunakan *e-mail* resmi yang terdaftar di SAPK dan telah di validasi oleh Instansi.
3. Proses aktivasi SSO dan pendaftaran sertifikat elektronik ke BSRÉ untuk DS wajib menggunakan *e-mail* resmi dari instansi yang memiliki domain go.id.
4. Masing-masing PNS harus memiliki 1 (satu) akun *e-mail* untuk aktivasi SSO, DS dan MySAPK.
5. Bahwa terdapat pegawai Kementerian Kesehatan yang telah memiliki sertifikat elektronik dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik melalui Pusat Data dan Informasi.
6. Menindaklanjuti hal tersebut dan untuk mendukung program diatas, bersama ini kami sampaikan agar seluruh pengelola kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk dapat memutakhirkan data PNS di lingkungan masing - masing satuan kerja pada aplikasi SIMKA. Adapun *field* data yang dimaksud yaitu **Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon genggam (aktif), dan alamat e-mail (aktif)**.
7. Pemutakhiran data tersebut agar dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal **26 Maret 2021 pukul 12.00 WIB**.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Kepegawaian,

ttt

drg. Inda Torisia Hatang, MKM
NIP 197307132002122005

Lampiran 1:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Sekretaris Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
8. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
9. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
10. Plt. Kepala Biro Umum
11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
12. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
13. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
14. Kepala Pusat Kesehatan Haji
15. Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan
16. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
17. Kepala Pusat Data dan Informasi
18. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
19. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id;|Pos-el: humas@bkn.go.id

Jakarta, 09 Maret 2021

Nomor : 685/B-SI.01.01/SD/E.III/2021

Lampiran : -

Perihal : Persiapan Implementasi Single
Sign ON (SSO), Digital
Signature (DS) Nasional dan
Pemutakhiran Data Mandiri ASN

Kepada

Yth. 1. Biro Kepegawaian/SDM Pemerintah
Pusat Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian
2. Kepala Kantor Regional I-XIV BKN
di-
Tempat

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa untuk mendukung percepatan penerapan SPBE Nasional dibutuhkan implementasi layanan SPBE Nasional satu pintu. Adapun layanan tersebut diterapkan dalam rangka mendukung program percepatan data ASN salah satunya melalui proses pemutakhiran data mandiri ASN yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, untuk itu bersama ini kami sampaikan kebutuhan implementasi sebagai berikut :

1. Penerapan autentifikasi satu pintu melalui *Single Sign On (SSO)* dan *Digital Signature (DS)* memerlukan proses aktivasi dengan menggunakan email dan nomor telepon ASN sebagai kunci akses.
2. Proses aktivasi akun MySAPK akan dilakukan dengan menggunakan email resmi yang terdaftar di SAPK dan telah di validasi oleh Instansi.
3. Proses aktivasi **SSO** dan pendaftaran sertifikat elektronik ke BSR E untuk **DS** wajib menggunakan email resmi dari instansi yang memiliki domain go.id.
4. Masing-masing PNS harus memiliki 1 (satu) akun email untuk aktivasi SSO, DS dan MySAPK
5. Proses rekonsiliasi data email dan nomor telepon dapat dilakukan secara kolektif melalui fitur rekon mandiri. Panduan rekon mandiri dapat diakses melalui link <http://bit.ly/rekonEmail>
6. Proses rekonsiliasi data JPT Non-PNS dapat dilakukan secara kolektif dengan melengkapi template yang dapat dikirim melalui link <http://tiny.cc/FormJPTNonPNS>.
7. Setiap Instansi (K/L/D) diharapkan dapat melaporkan hasil rekonsiliasi data tersebut kepada BKN. Instansi pusat dapat melaporkan kepada Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Kepegawaian (PIC Data), dan Instansi Daerah dapat melaporkan hasil rekonsiliasi data tersebut ke Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada Kantor Regional masing-masing.

8. Kantor Regional diharapkan dapat melaporkan hasil rekapitulasi proses rekonsiliasi data Instansi Daerah masing-masing kepada Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Kepegawaian (PIC Data Kantor Regional) terlampir.
9. Instansi diharapkan dapat menyelesaikan proses rekonsiliasi email dan JPT Non-PNS selambatlambatnya 31 Maret 2021.

Untuk informasi lebih lanjut dapat melalui kontak Sdr. Aliyah pada nomor 085696600109, Sdr. Rina Nurmariana pada nomor 0857-4332-6989672 atau alamat email : [ditlahta@bkn.go.id/](mailto:ditlahta@bkn.go.id)
satgassapk@gmail.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian
Informasi Kepegawaian

^

Tembusan Kepada Yth :
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Daftar Nama PIC Data Kantor Regional

Kanreg	PIC
I	Gunawan
II	Ekawati Kemastuti
III	Rina Nurmariana
IV	Andi Ibrahim/Marsono
V	Lugi Juwono
VI	Suwarno
VII	Rio Cahyadi
VIII	Bagus Nugroho
IX	Dede Rudianto
X	Natascha Lestari
XI	Dwi Pratiwi
XII	Wildan Amir
XIII	Elin Cahyaningsih
XIV	Mochamad Yasin

Pemutakhiran Data Mandiri ASN Alur

